

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah

yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	3.1	LRA
		3.1.1 Pendapatan_LRA
		3.1.2 Belanja
	3.2	LO
		3.2.1 Pendapatan –LO
		3.2.2 Beban
		3.2.3 Kegiatan Non Operasional
		3.2.4 Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas
		3.3.1 Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca
		3.4.1 Aset
		3.4.2 Kewajiban
		3.4.3 Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. *Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan*

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		2.500.000,00	2.500.000,00	#DIV/0!
2	PENDAPATAN TRANSFER			-	#DIV/0!
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			-	#DIV/0!
	JUMLAH PENDAPATAN	-	2.500.000,00	2.500.000,00	#DIV/0!

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Pajak Daerah				
b. Retribusi daerah				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d. Lain-Lain PAD yang sah		2.500.000		5.000.000
Jumlah	0	2.500.000	0	5.000.000

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			#DIV/0!	
Pendapatan Transfer Antar Daerah			#DIV/0!	
JUMLAH	NIHIL	NIHIL		NIHIL

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Hibah			#DIV/0!	
Dana Darurat			#DIV/0!	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			#DIV/0!	
JUMLAH	NIHIL	NIHIL		NIHIL

2. *Tabel pencapaian target dan realisasi belanja*

Belanja :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Operasi	64.150.041.048,00	58.946.328.182,00	0,92	31.072.779.001
b. Belanja Modal	667.986.000,00	554.859.775,00	0,83	
Jumlah	64.818.027.048,00	59.501.187.957,00	0,92	31.072.779.001,00

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 64.150.041.048 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 58.946.328.182 atau 92%.
- b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 554.859.775 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 667.986.000 atau 83%.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 92% dari yang dianggarkan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (ASN)
2. Standar Satuan Harga terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar sehingga penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan tidak maksimal.
3. Adanya kebijakan dari Pemkab (PPKM) sehingga kegiatan kunjungan kerja dibatasi.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000,00	#DIV/0!	5.000.000,00
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			#DIV/0!	
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			#DIV/0!	
Jumlah	-	2.500.000,00	#DIV/0!	5.000.000,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020, maka realisasi pendapatan yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.500.000 atau 50 %.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp. 0 Realisasi sebesar Rp. 2.500.000 atau 0 %. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Pajak Daerah			#DIV/0!	
b. Retribusi daerah			#DIV/0!	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			#DIV/0!	
d. Lain-Lain PAD yang sah		2.500.000,00	#DIV/0!	5.000.000,00
Jumlah	-	2.500.000,00		5.000.000,00

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar 0 atau realisasi mencapai Rp. 0.

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pajak Hotel			#DIV/0!	
Pajak Restoran			#DIV/0!	
Pajak Hiburan			#DIV/0!	

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pajak Reklame			#DIV/0!	
Pajak Penerangan Jalan			#DIV/0!	
Pajak Parkir			#DIV/0!	
Pajak Air Tanah			#DIV/0!	
Pajak Sarang Burung Walet			#DIV/0!	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			#DIV/0!	
Pajak Bumi dan Bangunan			#DIV/0!	
Pajak Lingkungan			#DIV/0!	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			#DIV/0!	
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dapat terealisasi Rp. 0 atau 0% dari target sebesar Rp. 0 sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Retribusi Jasa Umum			#DIV/0!	
Retribusi Jasa Usaha			#DIV/0!	
Retribusi Perizinan Tertentu			#DIV/0!	
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

Realisasi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan			#DIV/0!	
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			#DIV/0!	
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat			#DIV/0!	
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			#DIV/0!	
Retribusi Pelayanan Pasar			#DIV/0!	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			#DIV/0!	
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran			#DIV/0!	
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta			#DIV/0!	
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus			#DIV/0!	
Retribusi Pengolahan Limbah Cair			#DIV/0!	
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang			#DIV/0!	
Retribusi Pelayanan Pendidikan			#DIV/0!	
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi			#DIV/0!	
Retribusi Pelayanan Kependudukan			#DIV/0!	
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

2) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			#DIV/0!	
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan			#DIV/0!	
Retribusi Tempat Pelelangan			#DIV/0!	
Retribusi Terminal			#DIV/0!	
Retribusi Tempat Khusus Parkir			#DIV/0!	
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila			#DIV/0!	
Retribusi Rumah Potong Hewan			#DIV/0!	
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			#DIV/0!	
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			#DIV/0!	
Retribusi Penyeberangan di Air			#DIV/0!	
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			#DIV/0!	
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan			#DIV/0!	
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman			#DIV/0!	
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum			#DIV/0!	
Retribusi Izin Usaha Perikanan			#DIV/0!	
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas			#DIV/0!	
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)			#DIV/0!	
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan			#DIV/0!	
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp. 0 dari yang direncanakan sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	#DIV/0!	-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-	#DIV/0!	-
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-	#DIV/0!	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL		NIHIL

Rincian bagian laba sebagai berikut :

Nama BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta	Realisasi 2021
PT. Bank Jateng	
PD Bank Brebes	
BKK Banjarharjo	
BKK Jateng	
PD Air Minum Tirta Husada (PDAM)	
PD Percetakan	
PD Farmasi	
Jumlah	NIHIL

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp. 2.500.000 dari yang direncanakan sebesar Rp. 0 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Hasil Penjualan BMD Yang Tdk Dipisahkan			#DIV/0!	
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan			#DIV/0!	
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan			#DIV/0!	
Hasil Kerja Sama Daerah			#DIV/0!	
Jasa Giro Kas Daerah			#DIV/0!	
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			#DIV/0!	
Pendapatan Bunga			#DIV/0!	
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		2.500.000,00	#DIV/0!	5.000.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain			#DIV/0!	
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing			#DIV/0!	
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			#DIV/0!	
Pendapatan Denda Pajak Daerah			#DIV/0!	
Pendapatan Denda Retribusi Daerah			#DIV/0!	
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan			#DIV/0!	
Pendapatan dari Pengembalian			#DIV/0!	
Pendapatan BLUD			#DIV/0!	
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan			#DIV/0!	
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)			#DIV/0!	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			#DIV/0!	
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)			#DIV/0!	
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah			#DIV/0!	
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf			#DIV/0!	
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA			#DIV/0!	
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA			#DIV/0!	
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA			#DIV/0!	
Jumlah	-	2.500.000,00		5.000.000,00

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp. 0 Realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%. Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			#DIV/0!	
Pendapatan Transfer Antar Daerah			#DIV/0!	
JUMLAH	NIHIL	NIHIL		NIHIL

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Dana Perimbangan			#DIV/0!	
Dana Insentif Daerah (DID)			#DIV/0!	
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur			#DIV/0!	
Dana Keistimewaan			#DIV/0!	
Dana Desa			#DIV/0!	
JUMLAH	NIHIL	NIHIL		NIHIL

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Bagi Hasil			#DIV/0!	
Bantuan Keuangan			#DIV/0!	
JUMLAH	NIHIL	NIHIL		NIHIL

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp. 0 Realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%. Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Hibah			#DIV/0!	
Dana Darurat			#DIV/0!	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			#DIV/0!	
JUMLAH	NIHIL	NIHIL		NIHIL

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			#DIV/0!	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya			#DIV/0!	
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri			#DIV/0!	
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri			#DIV/0!	
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis			#DIV/0!	
JUMLAH	NIHIL	NIHIL		NIHIL

b. Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2021 NIHIL

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Hibah Dana BOS			#DIV/0!	
Pendapatan atas Pengembalian Hibah			#DIV/0!	
JUMLAH	NIHIL	NIHIL		NIHIL

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2021 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 59.501.187.957 dari anggaran Rp. 64.818.027.048 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Operasi	64.150.041.048,00	58.946.328.182,00	0,92	31.072.779.001
b. Belanja Modal	667.986.000,00	554.859.775,00	0,83	
Jumlah	64.818.027.048,00	59.501.187.957,00	0,92	31.072.779.001,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp. 58.946.328.182 dari anggaran sebesar Rp. 64.150.041.048. Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Belanja Pegawai	37.764.432.448,00	36.972.926.517,00	0,98	29.997.194.108,00
Belanja Barang dan Jasa	26.385.608.600,00	21.973.401.665,00	0,83	25.129.214.811,00
Jumlah	64.150.041.048,00	58.946.328.182,00	0,92	55.126.408.919,00

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Gaji dan Tunjangan	2.826.573.205,00	2.815.625.282,00	1,00	2.874.069.906,00
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.541.676.243,00	1.470.391.812,00	0,95	886.988.398,00
c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.000.183.000,00	32.293.909.423,00	0,98	
d. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	396.000.000,00	393.000.000,00	0,99	393.000.000,00
Jumlah	37.764.432.448,00	36.972.926.517,00	0,98	4.154.058.304,00

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Barang	4.368.047.600,00	3.058.403.565,00	0,70	3.449.608.268
b. Belanja Jasa	8.380.191.500,00	7.207.638.805,00	0,86	4.386.101.979
c. Belanja Pemeliharaan	1.046.150.500,00	725.718.399,00	0,69	386.064.954,00
d. Belana Perjalanan Dinas	12.591.219.000,00	10.981.640.896,00	0,87	16.151.398.331,00
J u m l a h	26.385.608.600,00	21.973.401.665,00	0,83	24.373.173.532,00

1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

Belanja Barang :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Barang Pakai Habis	4.368.047.600,00	3.058.403.565,00	0,70	3.922.296.950
J u m l a h	4.368.047.600,00	3.058.403.565,00	0,70	3.922.296.950,00

Penjelasan :

Rincian Belanja Barang Pakai Habis disajikan pada **lampiran 3.1.1**

2) Belanja Jasa sebesar Rp. 7.207.638.805 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Jasa Kantor	3.921.841.500,00	3.074.030.245,00	0,78	1.548.439.365,00
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.000.000,00	3.658.560,00	0,91	3.633.840,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	186.960.000,00	183.550.000,00	0,98	185.170.000,00
c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	164.000.000,00	150.850.000,00	0,92	150.800.000,00
d. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.750.000,00	8.550.000,00	0,98	400.000.000,00
e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.094.640.000,00	3.787.000.000,00	0,92	1.871.808.330,00
J u m l a h	8.380.191.500,00	7.207.638.805,00	0,86	4.159.851.535,00

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 725.718.399 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	726.768.500,00	415.759.399,00	0,57	186.364.954,00
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	297.906.000,00	289.737.000,00	0,97	194.800.000,00
c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.476.000,00	20.222.000,00	0,94	
d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			0,00	4.900.000,00
J u m l a h	1.046.150.500,00	725.718.399,00	0,69	386.064.954,00

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 10.981.640.896 dengan rincian sebagai berikut :

Belana Perjalanan Dinas :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.591.219.000,00	10.981.640.896,00	0,87	16.151.398.331,00
J u m l a h	12.591.219.000,00	10.981.640.896,00	0,87	16.151.398.331,00

5) Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			0,00	
b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			0,00	
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	0,00	NIHIL

6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar NIHIL

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar NIHIL

c. Realisasi Belanja Bunga sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bunga :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat			0,00	
b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain			0,00	
c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			0,00	
d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			0,00	
e. Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)			0,00	
f. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD			0,00	
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	0,00	NIHIL

d. Realisasi belanja Subsidi adalah NIHIL

e. Realisasi Belanja Hibah sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Hibah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat			0,00	
b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya			0,00	
c. Belanja Hibah kepada BUMN			0,00	
d. Belanja Hibah kepada BUMD			0,00	
e. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia			0,00	
f. Belanja Hibah Dana BOS			0,00	
g. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			0,00	
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	0,00	NIHIL

f. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu			0,00	
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga			0,00	
c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat			0,00	
d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)			0,00	
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	0,00	NIHIL

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 554.859.775 dari anggaran sebesar Rp. 667.986.000 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	642.686.000	531.159.775	0,83	523.506.000
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000	23.700.000	0,95	12.858.000
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.000	-	0,00	9.992.000
Jumlah	667.986.000	554.859.775	0,83	546.356.000

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 531.159.775 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	473.291.000,00	391.594.275,00	0,83	371.258.000,00
b. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21.541.000,00	9.180.000,00	0,43	43.200.000,00
c. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	0,00	2.050.000,00
d. Belanja Modal Komputer	147.854.000,00	130.385.500,00	0,88	106.998.000,00
Jumlah	642.686.000,00	531.159.775,00	0,83	523.506.000,00

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 23.700.000 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Gedung dan Bangunan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Bangunan Gedung	25.000.000,00	23.700.000,00	0,95	12.858.000,00
Jumlah	25.000.000,00	23.700.000,00	0,95	12.858.000,00

- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Aset Tetap Lainnya :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan	300.000,00	-	0,00	9.992.000,00
Jumlah	300.000,00	-	0,00	9.992.000,00

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020.

Pendapatan-LO tahun 2021 adalah sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO			-	0%
2. Pendapatan Transfer – LO			-	0%
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO			-	0%
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2021 adalah sebesar NIHIL dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan Asli Daerah-LO				
a. Pendapatan Pajak Daerah – LO			-	0%
b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO			-	0%
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO			-	0%
d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO			-	0%
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2021 adalah sebesar NIHIL dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan Transfer – LO				
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO			-	0%
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO			-	0%
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO			-	0%
d. Bantuan Keuangan - LO			-	0%
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2021 adalah sebesar NIHIL sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
a. Pendapatan Hibah – LO			-	0%
b. Dana Darurat – LO			-	0%
c. Pendapatan Lainnya – LO			-	0%
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0

a. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Pendapatan hibah – LO dirinci sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan Hibah – LO				
a. Pendapatan Hibah BEC			-	-
b. Penerimaan Pabrik Gula			-	-
c. Pendapatan Hibah Barang			-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-

b. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2021 sebesar NIHIL

c. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan Lainnya – LO				
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan			-	0%
b. Dispensasi Kelebihan Muatan			-	0%
c. Bantuan dari Pihak ke-3			-	0%
d. Tera Ulang			-	0%
e. Ijin Usaha Perkebunan			-	0%
f. Ijin Usaha Perikanan			-	0%
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu			-	0%
h. Pendapatan Dana BOS			-	0%
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	0

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

	Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
		Tahun 2021	Tahun 2020		
	Beban				
a.	Beban Operasi	60.562.016.711,00	56.915.914.805,00	(3.646.101.906,00)	-6,41%
b.	Beban Transfer			-	-
	Jumlah	60.562.016.711,00	56.915.914.805,00	(3.646.101.906,00)	-6,41%

1. Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

	Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
		Tahun 2021	Tahun 2020		
	BEBAN OPERASI				
a.	Beban Pegawai	37.008.823.904,00	30.015.677.358,00	(6.993.146.546,00)	-23%
b.	Beban Barang dan Jasa	22.054.001.601,00	25.077.214.545,00	3.023.212.944,00	12%
c.	Beban Bunga	-	-	-	0%
d.	Beban Subsidi	-	-	-	0%
e.	Beban Hibah	-	-	-	0%
f.	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	0%
g.	Beban Penyisihan Piutang	-	8.950.000,00	8.950.000,00	100%
h.	Beban Lain-lain	-	-	-	0%
i.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.028.488.052,00	1.360.485.723,00	331.997.671,00	24%
j.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	457.785.929,00	441.369.929,00	(16.416.000,00)	-4%
k.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.666.625,00	1.666.625,00	-	0%
l.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	0%
m.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	0%
n.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.950.600,00	10.550.625,00	600.025,00	6%
o.	Beban Bagi Hasil	-	-	-	0%
p.	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	0%
	Jumlah	60.562.016.711,00	56.915.914.805,00	(3.646.101.906,00)	-6,41%

a. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.489.240.606

dengan rincian sebagai berikut :

a.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.028.488.052
b.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	457.785.929
c.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.666.625
d.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.300.000

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2021 berupa amortisasi software sebesar Rp. 9.950.600 Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2021 sebagai berikut :

Nama Software	Umur s.d 2021	Nilai Software	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2020 (Rp)	Beban Amortisasi 2021 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2021 (Rp)
Software anti virus internet security	5	322.500,00	64.500	258.000		258.000
Software: Microsoft windows	5	2.677.625,00	535.525	2.142.100		2.142.100
Aplikasi Perjalanan dinas	3	49.753.000,00	9.950.600	19.901.200	9.950.600	29.851.800
			-	-		-
Jumlah	13	52.753.125	10.550.625	22.301.300	9.950.600	32.251.900

b. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar NIHIL, terdiri dari :

Beban Penyisihan Piutang :	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
Jumlah	NIHIL

2. Rincian Beban Transfer disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
a. Beban Bagi Hasil				
b. Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL		

a. Beban Bagi Hasil

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Beban Bagi Hasil				
a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
b. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa				
Jumlah	NIHIL	NIHIL		

b. Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Beban Bantuan Keuangan				
a. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi				
b. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
c. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
d. Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
e. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa				
f. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota				
g. Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik				
Jumlah	NIHIL	NIHIL		

3. Beban Tak Terduga tahun 2021 sebesar NIHIL

1.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	(37.664.285,71)	-	(37.664.285,71)	0%
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	-	-	-	0%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO			-	0%
JUMLAH	(37.664.285,71)	-	(37.664.285,71)	0
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	117.576.683,00	(117.576.683,00)	-100%
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	-	74.513.850,00	(74.513.850,00)	-100%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO				0%
JUMLAH	-	192.090.533,00	(192.090.533,00)	0%
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO	(37.664.285,71)	(192.090.533,00)	154.426.247,29	-80,39%

1. Surplus Non Operasional

Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	
1	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	(37.664.285,71)
2	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	
4	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
	Jumlah	(37.664.285,71)
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	

No	Uraian	Jumlah (Rp)
3	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
5	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
	Jumlah	-
	Total	(37.664.285,71)

Penjelasan :

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2021 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.277.228.200. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp. 37.664.285,71 (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada SKPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 (hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah). Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp. 37.664.285,71.

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar NIHIL

c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar NIHIL

2. Defisit Non Operasional

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	
2	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	
	Jumlah	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	
5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
	Jumlah	NIHIL
	Total	NIHIL

Penjelasan :

a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2020 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar NIHIL. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku NIHIL (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar NIHIL karena hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah. Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar NIHIL.

b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar NIHIL

c. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar NIHIL

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL.

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020.

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 22.281.143.875** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 24.360.621.908,71, ditambah Surplus-LO TA 2021 sebesar minus Rp. 60.599.680.996,71 ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar minus Rp. 878.484.994, dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp. 59.498.687.57.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2021(Rp)	2020(Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(878.484.994,00)	(1.073.000,00)
Jumlah	(878.484.994,00)	(1.073.000,00)

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. (878.484.994,00) merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2021(Rp)
Penyesuaian akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap	805.460.006,00
Jumlah	805.460.006,00

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2021(Rp)
Koreksi saldo awal Aset tetap (penghapusan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HPS	6.920.000,00
Pencatatan mutasi keluar aset tetap ke OPD - MUT	1.677.025.000,00
Jumlah	1.683.945.000,00

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
ASET		
Aset Lancar	9.770.700,00	69.233.060,00
Aset Tetap	22.421.929.870,00	24.234.795.695,00
Aset Lainnya	112.401.200,00	162.516.085,71
Jumlah Aset	22.544.101.770,00	24.466.544.840,71
KEWAJIBAN & EKUITAS		
Kewajiban	162.957.895,00	105.922.932,00
Ekuitas	22.381.143.875,00	24.360.621.908,71
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	22.544.101.770,00	24.466.544.840,71

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok aset lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	9.770.700,00	69.233.060,00
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	9.770.700,00	69.233.060,00

A. KAS

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan rincian sesuai tabel berikut:

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
KAS		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar NIHIL dan NIHIL.

B. PIUTANG

Saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar NIHIL dengan rincian dijelaskan sesuai lampiran :

Jenis Piutang	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Pendapatan :		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya :		
Piutang Lainnya		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

1) Piutang Pendapatan

a) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah sebesar NIHIL dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Pajak :	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Pajak Hotel		
Piutang Pajak Restoran		
Piutang Pajak Hiburan		
Piutang Pajak Reklame		
Piutang Pajak Penerangan Jalan		
Piutang Pajak Parkir		
Piutang Pajak Air Tanah		
Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
Piutang Pajak Lingkungan		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

b) Piutang Retribusi Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Retribusi Daerah :	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Retribusi Jasa Umum		
Piutang Retribusi Jasa Usaha		
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

c) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp . Rincian Piutang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

2. Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		
Piutang Jasa Giro		
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
Piutang Pendapatan Bunga		
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		
Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		
Piutang Pendapatan BLUD		
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		
Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		
Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

- a. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar NIHIL merupakan piutang kepada wajib pajak atas denda keterlambatan pembayaran pajak.
- b. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar NIHIL merupakan piutang kepada wajib retribusi atas denda keterlambatan pembayaran retribusi.
- c. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar NIHIL.
- d. Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar NIHIL.
- e. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar NIHIL.
- f. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang jasa dana bergulir yang dikelola Sekretariat DPRD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun 2021 sebesar NIHIL.
- g. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang jasa dana bergulir yang dikelola Sekretariat DPRD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun 2021

sebesar NIHIL

- h. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar NIHIL merupakan piutang pemanfaatan BMD yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2021.

d) Piutang Transfer

Piutang Transfer sebesar NIHIL dirinci sebagai berikut :

Piutang Transfer :	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Rincian Piutang Transfer dijelaskan sesuai tabel berikut :

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Dana Perimbangan		
Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		
Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur		
Piutang Dana Keistimewaan		
Piutang Dana Desa		
Piutang Transfer Dana Penyesuaian		
Piutang Transfer Lainnya		
Piutang Pendapatan Lainnya		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

2. Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Bagi Hasil		
Piutang Bantuan Keuangan		
Piutang Pendapatan Hibah		
Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		
Piutang Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana		
Piutang Pendapatan Hibah Dana BOS		
Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

1) Piutang Lainnya

Rincian Piutang Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Uang Muka		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar NIHIL
- b. Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang sebesar NIHIL
- c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar NIHIL
- d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar NIHIL

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas Putang TP-TGR yang akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Bagian Lancar ini merupakan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian yang telah ditetapkan dengan SKTJM atau Keputusan Pembebanan.

- e. Uang Muka sebesar NIHIL

C. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dirinci sesuai penjelasan berikut :

1) Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang	Th. 2021	Th. 2020
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
Penyisihan Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

2) Penyisihan Piutang Lainnya

Jenis Piutang	Th. 2021	Th. 2020
Penyisihan Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka		
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

D. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rekening ini merupakan biaya yang belum merupakan kewajiban Pemkab Brebes untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Saldo sebesar NIHIL.

E. PERSEDIAAN

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Persediaan :	Th. 2021	Th. 2020
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	9.770.700	69.233.060
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
Persediaan Barang BOS		
Jumlah	9.770.700	69.233.060

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2021 dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan :	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Bahan		127.723.345	127.723.345	-
Suku Cadang				-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	69.233.060	2.999.357.890	3.058.820.250	9.770.700
Obat-obatan		4.434.200	4.434.200	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga				-
Natura dan Pakan		2.181.364.100	2.181.364.100	-
Persediaan Penelitian				-
Persediaan Dalam Proses				-
Persediaan Barang BOS				-
Jumlah	69.233.060	5.312.879.535	5.372.341.895	9.770.700

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2021 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
SALDO AWAL	69.233.060
Koreksi (+) Saldo Awal	
Pengadaan / Pembelian	3.058.403.565

Uraian	Nilai (Rp)
Reklas Dari Belanja Tdk Terduga	
Reklas Dari B. Modal	
Reklas Dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Reklas Dari B. Pegawai	
Reklas Dari B. Jasa	
Reklas Dari Pemeliharaan	
Mutasi / Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Hutang Persediaan	
Reklas Antar Beban Persediaan (+)	2.254.475.970
Jumlah Penambahan	5.312.879.535
Koreksi (-) Saldo Awal	
Pemakaian	3.117.865.925
Mutasi Keluar	
Hibah Keluar	
Reklas Ke Aset Tetap	
Reklas Ke Ekstrakomtabel	
Reklas Ke Belanja Pegawai	
Reklas Ke Belanja Jasa	
Reklas Ke Belanja Pemeliharaan	
Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak	
Reklas Antar Beban Persediaan (-)	2.254.475.970
Jumlah Pengurangan	5.372.341.895
SALDO AKHIR PERSEDIAAN	9.770.700

Saldo persediaan tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Mutasi barang kadaluarsa dan rusak selama tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Bahan				
Suku Cadang				
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
Obat-obatan				
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga				
Natura dan Pakan				
Persediaan Penelitian				
Persediaan Dalam Proses				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

F. INVESTASI JANGKA PANJANG

Terdiri dari :

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar NIHIL

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar NIHIL merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada perusahaan daerah. Nilai ini berasal dari penambahan nilai penyertaan modal selama tahun 2021 dengan perhitungan metode ekuitas dan metode biaya.

Saldo PMPD masing-masing perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :		
1	BPD Bank Jateng		
2	BKK Jateng		
3	PD. BPR BKK Banjarharjo		
4	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)		
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :		
1	PDAM Tirta Baribis		
2	Perusda Perbengkelen		
3	Perusda Percetakan		
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan		
5	PRPP Jawa Tengah - Semarang		
	JUMLAH	NIHIL	NIHIL

Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal tahun 2021 dijelaskan dalam tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Modal Saham Pemkab Brebes Th. 2020	Penyertaan Modal 2021	Modal Saham Pemkab Brebes Th. 2021
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :			
1	BPD Bank Jateng			
2	BKK Jateng			
3	PD. BPR BKK Banjarharjo			
4	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)			
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :			
1	PDAM Tirta Baribis			
2	Perusda Perbengkelen			
3	Perusda Percetakan			
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan			
5	PRPP Jawa Tengah - Semarang			
	JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Investasi Jangka Panjang Permanen sesuai metode pencatatannya dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Metode Ekuitas

Perhitungannya dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo PMPD th. 2020	Total Ekuitas	% Kepemilikan Daerah	Saldo PMPD th 2021
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :				
1	PD. BPR BKK Banjarharjo				
2	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)				

No.	Perusahaan Daerah	Saldo PMPD th. 2020	Total Ekuitas	% Kepemilikan Daerah	Saldo PMPD th 2021
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :				
1	PDAM Tirta Baribis				
2	Perusda Perbengkalan				
3	Perusda Percetakan				
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan				
	J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) Metode Biaya

Perhitungannya dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo PMPD Th. 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo PMPD Th. 2021
1	BPD Bank Jateng				
2	BKK Jateng				
3	PRPP Jawa Tengah - Semarang				
	J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

G. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN**1. Aset Tetap**

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, pengadaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 42.111.754.059 dan Rp. 40.982.668.834 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	Th. 2021	Th. 2020
a. Tanah	1.084.500	821.884.500
b. Peralatan dan Mesin	15.556.505.701	16.709.290.926
c. Gedung dan Bangunan	24.913.654.608	24.092.854.608
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	145.028.000	145.028.000
e. Aset Tetap Lainnya	329.838.025	329.838.025
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	36.558.000	12.858.000
g. Akumulasi Penyusutan	(18.560.738.964)	(17.876.958.364)
Jumlah Aset Tetap	22.421.929.870	24.234.795.695

Mutasi aset tetap tahun 2021 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2021
a. Tanah	821.884.500	-	820.800.000	1.084.500
b. Peralatan dan Mesin	16.709.290.926	531.159.775	1.683.945.000	15.556.505.701
c. Gedung dan Bangunan	24.092.854.608	820.800.000	-	24.913.654.608
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	145.028.000	-	-	145.028.000

URAIAN JENIS	SALDO 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2021
e. Aset Tetap Lainnya	329.838.025	-	-	329.838.025
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	12.858.000	23.700.000	-	36.558.000
JUMLAH	42.111.754.059	1.375.659.775	2.504.745.000	40.982.668.834

- 1) Rincian **mutasi penambahan** aset tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Penambahan :	
1	Belanja Modal	554.859.775
2	Reklas Dari B. Pegawai	
3	Reklas Dari B. Jasa	
4	Reklas Dari B. Persediaan	
5	Reklas Dari B. Pemeliharaan	
6	Reklas Dari Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ke-3	
7	Hibah Masuk (Pemerintah Pusat)	
8	Hibah Masuk (Pemerintah Provinsi)	
9	Hibah Masuk (Pihak Ke-3)	
10	Hibah Masuk (Komite Sekolah)	
11	Mutasi Masuk	
12	Hutang Aset	
13	Reklas Dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	
14	Reklas Dari Aset Lainnya (Detail Engineering)	
15	Reklas Aset Tetap Dari KDP	
16	Koreksi Tambah (Mutasi Masuk Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih)	
18	Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya)	
19	Koreksi Tambah (Atribusi Nilai Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya)	
20	Koreksi Tambah (Hilang Pencatatan)	
21	Koreksi Tambah (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
22	Koreksi Tambah (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
23	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	820.800.000
24	Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap)	
25	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Detail Engineering Ke Aset Tetapnya Tahun Sebelumnya)	
	Jumlah Penambahan	1.375.659.775

Penjelasan :

- a) Koreksi tambah berupa Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap senilai Rp. 820.800.000

- 2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pengurangan :	
1	Extrakomtable	
2	Reklas Ke B. Persediaan	
3	Reklas Ke B. Pemeliharaan	
4	Reklas Ke B. Perjalanan Dinas	
5	Reklas Ke B. Pegawai	
6	Reklas Ke B. Jasa	
7	Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang	
8	Hibah Keluar	

NO	URAIAN	JUMLAH
9	Mutasi Keluar	1.677.025.000
10	Reklas Dari KDP Ke Aset Tetap	
11	Rusak Berat (RB)	
12	Tidak Ditemukan (TD)	
13	Penghapusan Barang B/RR	
14	Reklas Ke Aset Tidak Berwujud (ATB)	
15	Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya)	6.920.000
16	Koreksi Kurang (Mutasi Keluar Antar Opd Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Kurang (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
18	Koreksi Kurang (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
19	Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	820.800.000
20	Koreksi Kurang (Pemeliharaan Tahun Sebelumnya)	
21	Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan)	
22	Koreksi Kurang (BHP Tahun Sebelumnya)	
23	Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya)	
24	Koreksi Kurang (.....)	
	Jumlah Pengurangan	2.504.745.000

Penjelasan :

- a) Mutasi Keluar berupa:
 - Station Wagon ke SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kab. Brebes senilai Rp. 426.655.000
 - Station Wagon ke BADAN PENDAPATAN DAERAH Kab. Brebes Rp. 416.790.000
 - Station Wagon ke BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH Kab. Brebes Rp. 416.790.000
 - Station Wagon ke DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAN Kab. Brebes Rp. 416.790.000
 - b) Koreksi kurang Penghapusan Tahun Sebelumnya berupa koreksi penghapusan sepeda motor sesuai Surat Keputusan No. 050 /571 tahun 2016 senilai Rp. 6.920.000.
 - c) Koreksi kurang Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap berupa koreksi kode aset tetap Tanah Lapangan Tenis sesuai temuan inspektorat tentang salah pengkodean tanah & bangunan tahun 2021 senilai Rp. 820.800.000
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. 12.858.000 dan Rp. 36.558.000. Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Kemajuan Fisik (%)	Nominal KDP (Rp)	Nominal Terhutang (Rp)
belanja modal bangunan gedung kantor - detail engineering pengadaan mushola, kantin dan tempat parkir pada sekretariat DPRD Kabupaten Brebes TA 2021	CV. BINA GRAHA	020/097/PBJ/2021	23.700.000	100%	23.700.000	
Jumlah			23.700.000		23.700.000,00	-

Penjelasan :

- a) Pekerjaan tersebut bersumber dana dari DAU dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai kontrak sebesar Rp. 23.700.000, nilai KDP

tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 23.700.000, dan nilai terhutang sebesar NIHIL.

Mutasi Penambahan/Pengurangan KDP tahun 2021 dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Pekerjaan	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021	Ket
belanja modal bangunan gedung kantor - detail engineering pengadaan mushola, kantin dan tempat parkir pada sekretariat DPRD Kabupaten Brebes TA 2021	12.858.000,00	23.700.000		36.558.000,00	
JUMLAH	12.858.000,00	23.700.000		36.558.000,00	

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2021 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.365.273.860)		(415.881.955)	(13.949.391.905)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.423.321.754)	(1.032.345.930)		(4.455.667.684)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(88.362.750)	(1.666.625)		(90.029.375)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(65.650.000)		(65.650.000)
Jumlah	(17.876.958.364)	(1.099.662.555)	(415.881.955)	(18.560.738.964)

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Beban Penyusutan	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Jumlah Penambahan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.028.488.052)				(1.028.488.052)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.032.345.930)				(1.032.345.930)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.666.625)				(1.666.625)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(65.650.000)				(65.650.000)
Jumlah	(2.128.150.607)	-	-	-	(2.128.150.607)

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			(1.444.370.007)	(1.444.370.007)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				-
Jumlah	-	-	(1.444.370.007)	(1.444.370.007)

H. DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan Tahun 2021 sebesar NIHIL

I. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.301.175 dan Rp. 67.516.086 dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Tagihan Jangka Panjang	92.500.000	95.000.000
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud	52.753.125	52.753.125
Aset Lain-lain		37.664.286
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(32.851.925)	(22.901.325)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah	112.401.200	162.516.086

1. Tagihan Jangka Panjang tahun 2021 sebesar Rp. 92.500.000
2. Aset Tak Berwujud
Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp. 52.753.125. Saldo tersebut berupa software/aplikasi.
3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (32.851.925) Mutasi terdiri atas :
 - a. Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2020 sebesar Rp. (22.901.325)
 - b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp. (9.950.600)

3.4.2 Kewajiban**3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan saldo masing-masing sebesar Rp. 162.957.895 dan Rp. 105.922.932 dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	162.957.895	105.922.932
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah	162.957.895	105.922.932

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar NIHIL

1. Utang Bunga

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2021 adalah NIHIL

2. *Pendapatan Diterima Dimuka*

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2021 sebesar NIHIL.

3. *Bagian Lancar Utang Jangka Panjang*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar NIHIL.

4. *Utang Belanja*

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 162.957.895 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Utang Belanja Pegawai	114.147.387	78.250.000
Utang Belanja Barang dan Jasa - Persediaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Jasa	48.810.508	27.672.932
Utang Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas		
Utang Belanja Bunga		
Utang Belanja Subsidi		
Utang Belanja Hibah		
Utang Belanja Tidak Terduga		
Utang Belanja Bagi Hasil		
Utang Belanja Bantuan Keuangan		
Utang Belanja Bantuan Sosial		
Utang Beban Lain-lain		
Jumlah	162.957.895	105.922.932

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2021 sebesar Rp. 114.147.387
- b. Utang Belanja Jasa merupakan :

1	Utang atas belanja Telepon	Rp	222.545
2	Utang atas belanja Air	Rp	1.534.500
3	Utang atas belanja Listrik	Rp	19.401.163
4	Utang atas belanja Jasa Kawat/Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	Rp	5.452.300
5	Utang atas belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	3.700.000

6 Utang atas belanja Jasa Tenaga Ahli Rp 18.500.000

2. Pengurangan :

a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran tahun sebelumnya sebagai berikut :

1) Utang TPP bulan Desember 2020 sebesar Rp. 78.250.000

b. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran tahun sebelumnya sebagai berikut:

1	Utang atas belanja Telepon	Rp	213.096
2	Utang atas belanja Air	Rp	828.900
3	Utang atas belanja Listrik	Rp	17.456.636
4	Utang atas belanja Jasa Kawat/Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	Rp	5.474.300
5	Utang atas belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp	3.700.000

5. *Utang Jangka Pendek Lainnya*

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar NIHIL

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyeter kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar NIHIL.

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 22.381.143.875,00 dan Rp. 24.360.621.908,71. Perubahan atas ekuitas tahun 2021 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2021 :	NILAI (Rp)
EKUITAS AWAL	24.360.621.908,71
Surplus/(Defisit)-LO	(60.599.680.996,71)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Koreksi Ekuitas	(878.484.994,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	59.498.687.957,00
EKUITAS AKHIR	22.381.143.875,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci

mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. (59.498.687.957,00). Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp. (60.599.680.996,71) sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp. (1.100.993.039,71). Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA	(59.498.687.957,00)
Penambahan	2.925.029.377,00
Pengurangan	4.026.022.416,71
Surplus/(Defisit) LO	(60.599.680.996,71)

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan disampaikan dalam **lampiran 3.5.1**

3.5.1 Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.500.000,00	(2.500.000,00)
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			-
Jumlah	-	2.500.000,00	(2.500.000,00)

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
PENDAPATAN ASLI DAERAH		2.500.000,00	2.500.000,00

a. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Pajak Daerah			NIHIL

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Retribusi Daerah			NIHIL

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			NIHIL

d. Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain PAD yang Sah		2.500.000,00	2.500.000,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah th. 2021	2.500.000,00
Selisih	2.500.000,00

2. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			NIHIL

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Antar Daerah			NIHIL

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

a. Pendapatan Hibah

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hibah-LO			NIHIL

b. Dana Darurat

Selisih antara Dana Darurat-LO dengan Dana Darurat-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Dana Darurat-LO			NIHIL

- c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Selisih antara Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO dengan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			NIHIL

4. SURPLUS NON OPERASIONAL

- a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

- 1) Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	(37.664.285,71)		37.664.285,71

Selisih Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Pengurangan selisih penghapusan/pemusnahan BMD	37.664.285,71
Selisih	(37.664.285,71)

- 2) Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			NIHIL

- 3) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			NIHIL

- 4) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO			NIHIL

- b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

- 1) Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			NIHIL

- 2) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
--------	-----------	------------	---------

Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			NIHIL
--	--	--	-------

3) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			NIHIL

4) Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO			NIHIL

5) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			NIHIL

3.2.2 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.2.2.1 BEBAN OPERASI

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai	37.008.823.904	36.972.926.517	35.897.387
Beban Barang dan Jasa	22.054.037.101	21.973.401.665	80.635.436
Beban Bunga			
Beban Subsidi			
Beban Hibah			
Beban Bantuan Sosial			
Beban Penyisihan Piutang			
Beban Lain-lain			
Jumlah	59.062.861.005	58.946.328.182	116.532.823

1. Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.048.289.800	2.048.289.800	-

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.506.289.199	1.470.391.812	35.897.387

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN th. 2021	114.147.387
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	78.250.000
Selisih	35.897.387

c. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	32.293.909.423	32.293.909.423	-

d. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.000.000	393.000.000	-

2. Belanja Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang	3.117.865.925	3.058.403.565	59.462.360

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Saldo Awal 2021	69.233.060
Pengurangan Sakdo Akhir 2021	9.770.700
Selisih	59.462.360

b. Beban Jasa

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Jasa	7.228.811.881	7.207.674.305	21.137.576

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Hutang Beban Jasa	48.810.508
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa	27.672.932
Selisih	21.137.576

c. Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan	725.718.399	725.718.399	-

d. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas	10.981.640.896	10.981.640.896	-

3. Belanja Bunga

Selisih beban bunga LO dengan belanja bunga pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat			NIHIL

b. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain			NIHIL

c. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			NIHIL

d. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			NIHIL

e. Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat			NIHIL

f. Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD - Jangka Pendek

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek			NIHIL

g. Beban Bunga Utang Pinjaman

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman			NIHIL

4. Beban Subsidi

Selisih beban subsidi LO dengan belanja subsidi pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Subsidi kepada BUMN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada BUMN			NIHIL

b. Beban Subsidi kepada BUMD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada BUMD			NIHIL

c. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta			NIHIL

d. Beban Subsidi kepada Koperasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada Koperasi			NIHIL

5. Beban Hibah

Selisih Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat			NIHIL

b. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya			

c. Beban Hibah kepada BUMN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada BUMN			NIHIL

d. Beban Hibah Uang kepada BUMD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Uang kepada BUMD			NIHIL

e. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			NIHIL

f. Beban Hibah Dana BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Dana BOS			NIHIL

g. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik			NIHIL

6. Beban Penyisihan Piutang

Selisih Beban Penyisihan Piutang LO dengan LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah			NIHIL

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah			NIHIL

c. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan			NIHIL

d. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			NIHIL

e. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat			NIHIL

f. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah			NIHIL

g. Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lainnya			NIHIL

3.2.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.028.488.052,00		(1.028.488.052,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	457.785.929,00		(457.785.929,00)
Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.666.625,00		(1.666.625,00)

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.300.000,00		(1.300.000,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya			-
Jumlah	1.489.240.606,00	-	(1.489.240.606,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyusutan th. 2021	1.489.240.606,00
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	1.489.240.606,00

2. Beban Amortisasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.950.600,00		(9.950.600,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Amortisasi th. 2021	9.950.600,00
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	9.950.600,00

3.2.2.3 BEBAN TRANSFER

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil			
Beban Bantuan Keuangan			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1. Beban Bagi Hasil

Selisih Beban Bagi Hasil LO dan Belanja Bagi Hasil LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa			
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Beban Bantuan Keuangan

Selisih Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa			
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota			
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.2.2.4 BEBAN TIDAK TERDUGA

Selisih Beban Tidak Terduga LO dan Belanja Tidak Terduga LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tidak Terduga			NIHIL

3.2.2.5 DEFISIT NON OPERASIONAL

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Selisih Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO			
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Selisih Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO			
Defisit Penyelesaian Obligasi-LO			
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO			
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO			
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB IV**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN****3.1 UMUM**

Kabupaten Brebes memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berbeda saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusi, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes memiliki Tugas Pokok sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes tertuang dalam Restra 2020-2024, sebagai berikut :

a. Visi

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah :

“ TERWUJUDNYA DUKUNGAN ADMINISTRASI YANG UNGGUL TERHADAP KINERJA FUNGSI DPRD ”

b. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan sumber daya manusia organisasi
2. Meningkatkan fasilitas organisasi/ lembaga dengan dukungan substansi kinerja DPRD melalui anggaran yang konsisten
3. Meningkatkan disiplin organisasi
4. Meningkatkan kesejahteraan SDM organisasi
5. Meningkatkan peranan Teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan efisiensi kerja, manajemen dan pelayanan

4.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

I. Sekretaris;

II. Bagian Program & Keuangan

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.

III. Bagian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Persidangan;

- a. Sub Bagian Fasilitasi Persidangan dan Risalah;
- b. Sub Bagian Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
- c. Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum.

IV. Bagian Umum;

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

V. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

- a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
- b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
- c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

4.3 PERSONALIA

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes memiliki 99 personil, terdiri dari 1 orang Kepala Sekretaris DPRD, 4 orang Kepala Bagian, 10 orang Kasubag, orang staf di mana 27 orang adalah PNS dan 57 orang adalah tenaga kontrak/tenaga harian lepas.

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BREBES

KOMAR, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640714 199203 1 006